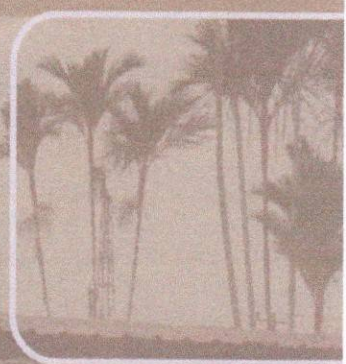




disdukcapil
Kabupaten Pesisir Selatan

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



Instagram: @disdukcapilpesisirs selatan
Whatsapp: 0823-6347-5396
Email: dukcapilpessel@gmail.com

Website: wwdisdukcapil.pesisirs selatankab.go.id
Facebook: Disdukcapil Pesisir Selatan
Alamat: Jl. Pemuda No. 1 Painan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Perubahandisusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, Intensitas kerja serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manusia Kabupaten Pesisir Slatan Tahun 2025 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kedepan.

Painan, 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP./19720302 199302 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4 Review Terhadap Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perubahan	27
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN.....	36
BAB V PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	7
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab Pesisir Selatan	16
Tabel	2.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil.....	18
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel	2.5	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	25
Tabel	3.1	Identifikasi Kebiasaan Nasionak.....	26
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pesisir Selatan	29
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	30
Tabel	4.1	Perubahan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). UU ini secara substansi mengamanahkan penyusunan Renja perubahan Perangkat Daerah untuk periode tahunan guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya penyusunan Rencana Kerja diatur oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026.

RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah tersusunnya rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang terurai secara tepat dan terarah pada Tingkat kebijakan, program dan kegiatan hingga indikator kinerja serta rencana dan anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2025.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 serta untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan Anggaran 2025 secara terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta permasalahan yang perlu segera ditangani.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;

BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bab ini menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN PESISIR SELATAN

Bab ini menyajikan tentang evaluasi terhadap realisasi pendanaan rencana kerja tahun berjalan dan penjabaran perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan.

BABIV PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Sampai dengan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam perencanaan strategis, evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan RI. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada Bab II ini akan dipaparkan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (renja) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun tahun berjalan		
					Target Renja tahun (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program	: Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12.01.2.01	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indikator Kegiatan	: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	54	8	8	8	100%	8	24	44%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Indikator	: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.02	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Indikator	: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	44	8	8	8	100%	8	24	54%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (renja) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun berjalan		
					Target Renja tahun (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.12.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Indikator Kegiatan	Persentase tertib administrasi keuangan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Indikator	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2100	437	280	274	97,85%	280	997	47,48%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Indikator	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	60	12	12	12	100%	11	36	60%
2.12.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Indikator Kegiatan	Persentase tertib administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik	Indikator	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	11	2	1	1	100%	4	7	66%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	0	0	0	-	-	2	66%
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Indikator	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	10	2	3	3	100%	1	6	60%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	7	2	1	1	%	1	4	71%

2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator	:	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	15	6	3	3	100%	--	9	60%
2.12.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Indikator	:	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indikator	:	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2.12.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator	:	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Indikator	:	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	18	3	1	1	100%	5	9	87%
2.12.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	:	Persentase Keteresuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator	:	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2.12.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	:	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%
2.12.01.209.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan	Indikator	:	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	110	22	22	22	100%	22	66	60%

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Indikator	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	110	22	22	22	100%	22	66	60%	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Indikator	: Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	110	22	22	22	100%	22	66	60%	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Indikator	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	5	1	1	1	100%	1	3	60%	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indikat or Progra m	: Rasio Penduduk Ber KTP	0,998	0,995	0,996	0,996	100%	0,996	0,996	100%	
			: Rasio Penduduk yang memiliki KIA	71	72	40,09	40,09	100%	62	62,54	88%	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indikator Kegiatan	: Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90%	80%	87	87,39	100,45	88	87,82	99,76%	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Indikator	: Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	60	12	12	12	100%	12	36	60%	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Indikat or Progra m	: Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	0,995	0,996	0,996	0,996	100%	0,996	0,997	100%	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Indikator Kegiatan	: Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90%	80%	87	87,39	100,45	88	87,82	99,76%	

2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Indikator	:	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2.12.04	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indikator Program	:	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	98	95	96	96	100%	96,5	96,5	98%
2.12.04.2.01	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indikator Kegiatan	:	Persentase Pengolah data dalam kondisi baik	90%	80%	87	87,39	100,45	88	87,82	99,76%
2.12.04.2.01.01	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Indikator	:	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasikependudukan	50	12	12	12	100%	12	36	60%
2.12.05	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Indikator Program	:	Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Indikator Kegiatan	:	Persentase Validitas database kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Indikator	:	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	5	2	1	1	100%	1	4	80%

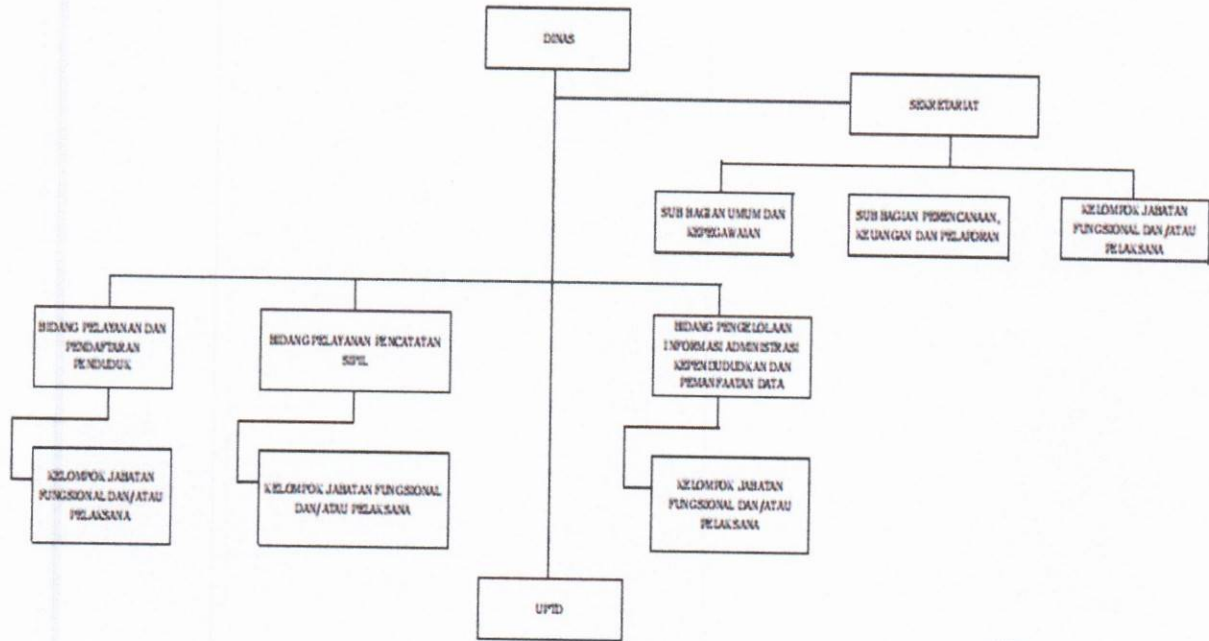
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

- a. KepalaDinas;
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub BagianUmum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pencatatan Sipil:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkruen Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan kabupaten/kota; dan
- Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

1. Penerbitan kartu keluarga;
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-el);
3. Penerbitan kartu identitas anak (KIA);
4. Penerbitan surat keterangan pindah WNI;
5. Penerbitan surat keterangan datang WNI;
6. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
7. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
8. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;
9. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
10. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan;

12. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
13. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian;
14. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
15. Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
16. Pencatatan pengangkatan anak;
17. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
18. Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
19. Legalisasir dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
20. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
21. Surat Keterangan Tempat Tinggal
22. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

Tabel C.30 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi		89	90	90	90	89,49	89,90	90	85,20		
2.	Nilai Kematangan Inovasi PD			100	100	80	81	87	66	79	81		
3.	Indeks kepuasan Masyarakat			84	84	84	84	90,99	91,50	92	8		
4.	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil			100	100	92,35	92,50	100	92,31	93	92,5		
5.	Rasio Penduduk ber KTP			0,995	0,996	0,996	0,997	0,993	0,995	0,996	0,997		
6.	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik			97	97,5	97,6	97,8	97,07	99,59	97,37	97,8		
7.	Cakupan Perekaman KTP el			√	97,50	97,55	97,60	97,65	97,51	99,59	97,37	97,65	
8.	Jumlah Anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA			√	40	50	60	62	40,09	62,54	55,81	62	
9.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran			√	99,10	99,20	99,30	99,40	99,36	99,39	99,75	99,80	
10.	Jumlah OPD yang telah memiliki memanfaatkan data kependudukan			√	6	7	7	10	6	7	7	10	
11.	Dokumen Profil kependudukan yang dihasilkan				1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat diturunkan sebagai berikut:

1. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatansipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem, yaitu SIAK.
2. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
3. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
4. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
5. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll).
7. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dampak permasalahan yang dihadapi berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program unggulan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak permasalahan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan seperti Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil belum optimal	Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil masih terpusat di kantor Disdukcapil	Kurangnya jumlah SD yang terampil	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.
2	Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD maupun instansi layanan publik lainnya belum optimal	Terdapat OPD yang belum mengajukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD masih merasa belum memerlukan akses pemanfaatan data kependudukan	
3	Inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil belum optimal	Inovasi hanya terbatas pada sebagian kecil dari seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan	Aplikasi SIAK terpusat dari pusat yang merupakan mandatori Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Indonesia	

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:

1. Dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut akan berdampak semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.
2. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.
 - b. Adanya pengembangan inovasi Implementasi Identitas Kependudukan Digital yang tengah diuji cobakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA- PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada berdasarkan Rancangan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Rancanangan Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesisir Selatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.981.567.402	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesisir Selatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.981.567.402	
	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	44.509.000	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	44.509.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	28	44.509.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	28	44.509.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	2.421.843.401	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	2.421.843.401	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280	2.325.563.401	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280	2.325.563.401	
	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	12	96.280.000	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	12	96.280.000	

	Administrasi umum perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi umum	100%	967.302.460	Administrasi umum perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi umum	100%	967.302.460	
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	3	5.925.524	Penyediaan komponen instalasi listrik	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	3	5.925.524	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	6.560.250	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	6.560.250	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	4	764.470.186	Penyediaan bahan logistik kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	4	764.470.186	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	4	13.270.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	4	13.270.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	-	-	
	Fasilitas kunjungan tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	3.300.000	Fasilitas kunjungan tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	3.300.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	173.776.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	173.776.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	123.076.157	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	123.076.157	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	123.078.157	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	123.078.157	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keteresuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.245.557.384	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keteresuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.245.557.384	
	Sub Kegiatan Penyediaan	Pesisir	Jumlah laporan penyediaan jasa	12	102.847.747	Sub Kegiatan	Pesisir	Jumlah laporan penyediaan jasa	12	102.847.747	

	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Selatan	komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Selatan	komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.142.709.637	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.142.709.637	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	163.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	163.860.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	1	40.740.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	1	40.740.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	22	69.850.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	22	69.850.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	22	30.950.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	22	30.950.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	1	22.320.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	1	22.320.000	
	PROGRAM	Pesisir Selatan	Rasio Penduduk Ber	0,996	4.240.500	PROGRAM	Pesisir Selatan	Rasio Penduduk Ber KTP	0,996	4.240.500	

	PENDAFTARAN PENDUDUK		KTP			PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Rasio Penduduk yang memiliki KIA	70				Rasio Penduduk yang memiliki KIA	70	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	74%	4.240.500	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	74%	4.240.500
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	4.240.500	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	4.240.500
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pesisir Selatan	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	98	3.531.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pesisir Selatan	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	98	3.531.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98%	3.531.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98%	3.531.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	3.531.000	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	3.531.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	-	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	-	-
	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	97,60	7.645.500	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	97,60	7.645.500

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Pengolah data dalam kondisi baik	100%	7.645.500	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Pengolah data dalam kondisi baik	100%	7.645.500	
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12	7.645.500	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12	7.645.500	
	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan	-	-	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan	-	-	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Validitas database kependudukan	-	-	Penyusunan Profil Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Validitas database kependudukan	-	-	
	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Pesisir Selatan	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	-	-	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Pesisir Selatan	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	-	-	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 3 yang implementasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Esensi dari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah pengakuan Negara dan perlindungan terhadap hak sipil dan status hukum penduduk dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga tertib administrasi dibidang kependudukan merupakan kata kunci dalam memberikan hak-hak sipil dan status hukum penduduk.

Dalam upaya mencapai tertib administrasi dibidang kependudukan, ada 3 hal pokok sasaran kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- Data base kependudukan
- Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- Dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Capil dll)

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Database	APBN	Tersentralisasi secara nasional
2	Penerbitan NIK	APBN	Tersentralisasi secara nasional
3	Dokumen Kependudukan	APBN	Standard Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur“** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi **“Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Menembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transportasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2025 yang berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Sejalan dengan kebijakan RPJMD pada misi ke-1 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran pembangunan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Awal	Target Kinerja Setelah Perubahan
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	B	B
	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(90)	A (85)
	2. Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi	80	80
	3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92
		Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	93	92,33

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, merupakan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan. Didalam tahapan penyusunan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dijelaskan bahwa jika rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPDP baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya maka akan dilakukan perbaikan terhadap program, kegiatan dan sub Kegiatan yang tersaji dalam RKPDP Perubahan Tahun 2025.

Tabel 3.3
Rumusan rencana program dan kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Setelah Perubahan Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT ANDENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Dukcapil Pesisir Selatan		5.052.707.571				4.981.567.402
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Dinas Dukcapil Pesisir Selatan		5.052.707.571				4.981.567.402
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	100%	4.471.648.271	APBD		100%	4.981.567.402
2.12.01.2.01	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	100%	66.982.800	APBD		100%	44.509.000

2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	-	-	APBD	-	-
2.12.01.2.01.02	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	28	66.982.800	APBD	28	44.509.000
2.12.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	100%	2.506.595.070	APBD	100%	2.421.843.401
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	280	2.409.395.070	APBD	280	2.325.563.401
2.12.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	97.200.000	APBD	12	96.280.000
2.12.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase tertib administrasi umum	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	100%	391.589.960	APBD	100%	967.302.460
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	3	5.925.524	APBD	3	5.925.524
2.12.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Dukcapil Pesisir	2	6.560.250	APBD	2	6.560.250

			Selatan					
2.12.01.2.06.0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	4	54.487.186	APBD	4	764.470.186
2.12.01.2.06.0 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	4	13.270.000	APBD	4	13.270.000
2.12.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	-	5.400.000	APBD	-	-
2.12.01.2.06.0 8	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	7.062.000	APBD	12	3.300.000
2.12.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	298.885.000	APBD	12	173.776.500
2.12.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	100%	64.624.500	APBD	100%	123.076.157
2.12.01.207.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	5	64.624.500	APBD	5	123.078.157
2.12.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keteresuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Dukcapil	100%	1.126.709.637	APBD	100%	1.245.557.384

		Daerah	Pesisir Selatan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	143.876.304	APBD		12	102.847.747
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	1.126.709.637	APBD		12	1.142.709.637
2.12.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	100%	176.670.000	APBD		100%	163.860.000
2.12.01.209.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	1	40.690.000	APBD		1	40.740.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	22	95.300.000	APBD		22	69.850.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	22	25.800.000	APBD		22	30.950.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	Dinas Dukcapil Pesisir	1	25.800.000	APBD		1	22.320.000

			Selatan						
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk Ber KTP	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	0,996	26.592.750	APBD		0,996	4.240.500
		Rasio Penduduk yang memiliki KIA	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	70		APBD		70	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	74%	26.592.750	APBD		74%	4.240.500
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	26.592.750	APBD		12	4.240.500
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	98	521.992.750	APBD		98	3.531.000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	98%	21.992.750	APBD		98%	3.531.000
2.12.03.01.07	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas hasil Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	21.992.750	APBD		12	3.531.000
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan pencatatan sipil	Dinas Dukcapil		500.000.000			-	-

	pendaftaran sipil		Pesisir Selatan						
2.12.03.2.03.04	Bimbingan teknis terkait pendaftaran sipil	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran sipil	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	1	500.000.000			-	-
2.12.04	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	-	-	APBD		-	-
2.12.04.2.01	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengolah data dalam kondisi baik	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	97,60	7.645.500	APBD		97,60	7.645.500
2.12.04.2.01.01	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	100%	7.645.500	APBD		100%	7.645.500
2.12.05	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	12	7.645.500	APBD		12	7.645.500
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	-	-	APBD		-	-
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	Dinas Dukcapil Pesisir Selatan	-	-	APBD		-	-

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta barang daerah sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025 sudah disesuaikan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Pada Renja Perubahan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program sebanyak 4, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Kegiatan sebanyak 9, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

8. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

c. Sub Kegiatan sebanyak 20, yaitu :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan tugas ASN
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
18. Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
19. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
20. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

TABEL 4.1
PERUBAHAN RENCANA PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025

No	Rancangan Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesisir Selatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.981.567.402	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesisir Selatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.981.567.402	
	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	44.509.000	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	44.509.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	28	44.509.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	28	44.509.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	2.421.843.401	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	2.421.843.401	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280	2.325.563.401	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280	2.325.563.401	
	Penyediaan administrasi	Pesisir	Jumlah dokumen hasil penyediaan	12	96.280.000	Penyediaan	Pesisir	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi	12	96.280.000	

	pelaksana tugas ASN	Selatan	administrasi pelaksana tugas ASN			administrasi pelaksana tugas ASN	Selatan	pelaksana tugas ASN			
	Administrasi umum perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi umum	100%	967.302.460	Administrasi umum perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi umum	100%	967.302.460	
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	3	5.925.524	Penyediaan komponen instalasi listrik	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	3	5.925.524	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	6.560.250	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	6.560.250	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	4	764.470.186	Penyediaan bahan logistik kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	4	764.470.186	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	4	13.270.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	4	13.270.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	-	-	
	Fasilitas kunjungan tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	3.300.000	Fasilitas kunjungan tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	3.300.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	173.776.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	173.776.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	123.076.157	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	123.076.157	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	123.078.157	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	123.078.157	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keteresesuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.245.557.384	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keteresesuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.245.557.384	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	102.847.747	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	102.847.747	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.142.709.637	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.142.709.637	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	163.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	163.860.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	1	40.740.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	1	40.740.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	22	69.850.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	22	69.850.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	22	30.950.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Pesisir Selatan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	22	30.950.000	

			lainnya.			lainnya					
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	1	22.320.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	1	22.320.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pesisir Selatan	Rasio Penduduk Ber KTP	0,996	4.240.500	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pesisir Selatan	Rasio Penduduk Ber KTP	0,996	4.240.500	
			Rasio Penduduk yang memiliki KIA	70				Rasio Penduduk yang memiliki KIA	70		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	74%	4.240.500	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	74%	4.240.500	
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	4.240.500	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	4.240.500	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pesisir Selatan	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	98	3.531.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pesisir Selatan	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	98	3.531.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98%	3.531.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98%	3.531.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	3.531.000	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	12	3.531.000	
	Pembinaan dan	Pesisir Selatan	Persentase Pembinaan dan	-	-	Pembinaan dan	Pesisir Selatan	Persentase Pembinaan dan	-	-	

Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Pengawasan Pencatatan Sipil				Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Pengawasan Pencatatan Sipil			
PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	97,60	7.645.500		PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	97,60	7.645.500	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Pengolah data dalam kondisi baik	100%	7.645.500		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Pengolah data dalam kondisi baik	100%	7.645.500	
Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12	7.645.500		Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12	7.645.500	
PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan	-	-		PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan	-	-	
Penyusunan Profil Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Validitas database kependudukan	-	-		Penyusunan Profil Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Validitas database kependudukan	-	-	
Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Pesisir Selatan	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	-	-		Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Pesisir Selatan	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	-	-	

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga Rencana Kerja Perubahan yang merupakan perencanaan satu tahun kedepan dan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana kerja perubahan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang penting yang dipedomani sebagai arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2025 dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian rencana kerja ini bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintahan Pusat.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan Langkah kaidah pelaksanaan sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

- keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika Perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja berikutnya.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui pemahaman tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras.

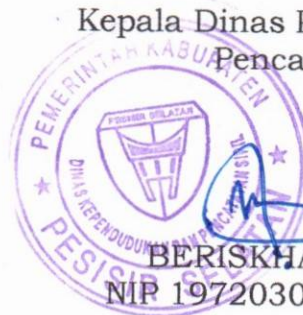
Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian misi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokrasi dan Transparan”.

Dengan mengharapakan keridhoan Tuham Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 yang telah dibuat dapat diwujudkan.

Painan, 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP 19720302 199302 1 001

- keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika Perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja berikutnya.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui pemahaman tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras.


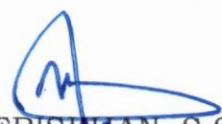
Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian misi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokrasi dan Transparan”.

Dengan mengharapkan keridhoan Tuham Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 yang telah dibuat dapat diwujudkan.

Painan, 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP 19720302 199302 1 001

